



AMERICAN FIRST: KEBIJAKAN DONALD TRUMP DALAM PEMBATASAN KAUM IMIGRAN KE AMERIKA SERIKAT

Taufik¹, Sundari Ayu Pratiwi²

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung; Indonesia:

taufik@unpas.ac.id

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia:

sundaariayu231@gmail.com

Abstract

This article discusses the reasons for President Donald Trump's selective isolationism in issuing a policy to limit the entry of immigrants to the United States with the slogan American First. To that end, a qualitative approach and literature study were carried out and the concept of a foreign policy of isolationism was used. By referring to the three main US policies in overcoming the issue of immigrants in their country, namely: nationalism, anti-immigrant and anti-Muslim, this study results in the fact that Trump uses selective isolationism as the US grand strategy for reasons of national security. However, this American First narrative actually makes the US tend to use a counter-narrative that tends to sharpen social discrimination in the US which is supported by white supremacists.

Keywords: foreign policy, immigran, isolationism, Trump, United State of America

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan alasan *selective isolationism* Presiden Donald Trump dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya kaum imigran ke Amerika Serikat dengan slogan *American First*. Untuk itu, pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan dilaksanakan dan konsep kebijakan luar negeri isolasionisme digunakan. Dengan mengacu pada tiga kebijakan utama AS dalam mengatasi isu imigran di negaranya, yakni: nasionalisme, anti-imigran dan anti-muslim, penelitian ini menghasilkan fakta bahwa Trump menggunakan *selective isolationism* sebagai *grand strategy* AS dengan alasan keamanan nasional. Akan tetapi, narasi *American First* ini malah menjadikan AS cenderung menggunakan kontra narasi yang cenderung mempertajam diskriminasi sosial di AS yang disokong oleh supremasi kulit putih.

Kata kunci: Amerika Serikat, imigran; isolasionalisme, kebijakan luar negeri, Trump

Pendahuluan

Pada tahun 2002-2004 Amerika Serikat (AS) memberikan status kewarganegaraannya untuk kaum imigran yang berasal dari benua Asia, yaitu kaum imigran yang berasal dari negara Tiongkok, India, Filipina dan Vietnam serta kepada salah satu negara dari Amerika Latin yaitu Meksiko. Negara imigran pantas disematkan untuk AS karena 90% masyarakatnya berasal dari tiga benua lain yaitu benua Asia, Eropa dan Afrika (Voice of America, 2005). Namun kehadiran kaum imigran ke AS dianggap membawa masalah bagi negara dan warga AS selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Saat masa kampanye pemilihan umum presiden tahun 2016 di AS, Trump sudah banyak menyuarakan isu imigrasi dan ini menjadi masalah domestik yang paling penting dibahas di AS selama masa kepemimpinannya. Terlihat dari berbagai kebijakan Donald Trump terhadap kaum imigran di AS mengacu pada kebijakan nasionalisme, kebijakan anti-imigran dan kebijakan anti-muslim.

Kaum imigran yang datang ke AS, bagi Trump dan orang-orang yang mendukungnya, dinilai sebagai pengganggu atau kelompok yang ke depannya dapat atau mampu mengambil alih lapangan pekerjaan yang tersedia di AS, sehingga menambah jumlah pengangguran bagi warga negara atau penduduk asli AS. Dalam konteks ini bagi Trump sistem pengetatan keimigrasian akan membuat tingkat pengangguran di AS menurun (Yuliantoro dkk., 2017: 198). Kebijakan Trump ini, juga sebagai respons atas kebijakan Presiden sebelumnya, Barack Obama, yang menerima pengungsi asal Suriah sebanyak 12.000 orang selama tahun 2015 (Yuliantoro dkk., 2017: 200). Termasuk keresahan Trump pada situasi ekonomi dan maraknya pengangguran di AS.

Sejak kampanye pemilu presiden tahun 2016, Trump telah menawarkan konsep/slogan *American First: Make America Great Again* dan menjadi cita-cita besar Trump sebagai langkah dalam melindungi warga negara dan kepentingan nasional, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti keimigrasian dan terorisme (Sanjaya, 2017). Di satu sisi, saat menjadi Presiden, Trump akhirnya mengarahkan kebijakan luar negeri AS menjadi unilateralisme atau kebijakan yang lebih berorientasi pada isu dalam negeri. Bahkan secara jelas Trump menunjukkan kebijakan luar negeri AS yang lebih isolasionisme dan dihubungkan oleh posisi garis keras terkait keimigrasian (Wardhana & Dugis, 2019). Di sisi lain, Trump juga bersikap antagonis kepada negara lain dalam hal

ekonomi dan imigrasi, sehingga berdampak pada kebijakan proteksi ekonomi, dan hambatan perdagangan oleh AS, termasuk dengan Indonesia (Minardi dkk., 2019).

Padahal di satu sisi, imigran sebenarnya telah membentuk AS sebagai sebuah bangsa sejak pendatang pertama tiba lebih dari empat ratus tahun yang lalu. Mereka telah memberikan kontribusi yang mendalam bagi banyak proses ekonomi, sosial, dan politik yang mendasar bagi AS sebagai sebuah bangsa. Di sisi lain, dibalik banyaknya kedatangan kaum imigran tersebut, AS dihadapkan pada sebuah permasalahan dengan keberadaan kaum imigran yang dapat mengurangi aktivitas perekonomian bagi masyarakat asli AS. Masyarakat asli AS harus bersaing dengan para kaum imigran untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Terlebih para kaum imigran yang datang tanpa prosedur resmi dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan AS, seperti: perdagangan narkoba, pelaku perdagangan manusia, pemerkosaan dan kekerasan lainnya. Selain itu, Trump juga mengkritik kebijakan Obama yang menerima pengungsi Suriah sebanyak 12.000 pada tahun 2015. Trump menganggap hal ini dapat memperbesar masuknya aksi kriminal dan terorisme di AS (Yuliantoro dkk., 2017: 200). Sebagai negara *super power* AS menjadi salah satu tujuan bagi para kaum imigran untuk datang dengan harapan dapat membantu memperbaiki kehidupan mereka. Di samping itu, situasi dan kondisi dari negara para kaum imigran tersebut juga turut mempengaruhi, seperti konflik atau perang saudara, yang memaksa mereka untuk keluar dari negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman. Begitu beragamnya latar belakang dari kedatangan kaum imigran ke AS menjadikan isu ini sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan AS dan masyarakatnya.

Selain itu, seperti yang digambarkan dalam kajian Pujayanti, kebijakan Trump dinilai diskriminatif karena melarang tujuh negara mayoritas muslim untuk memasuki wilayah AS, yakni; Libya, Yaman, Irak, Iran, Somalia, Suriah dan Sudan. Ketujuh negara tersebut dianggap sebagai sarang teroris. Salah satu dampak kebijakan Trump ini adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke AS, dan reaksi penolakan baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan keimigrasian ini merupakan kebijakan populis nasionalistik AS dalam melindungi atau memproteksi segala kepentingannya dari berbagai ancaman, termasuk isu keimigrasian. Meskipun demikian, kebijakan pembatasan keimigrasian ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi AS yang dipercaya oleh masyarakatnya sebagai sebuah bangsa akan tanah kebebasan dan harapan (Pujayanti, 2017).

Artikel ini menganalisis dan mendiskusikan tentang alasan Trump terhadap kaum imigran di AS berdasarkan visi *American First: Make American Great Again* dengan basis konsep kebijakan luar negeri Presiden Trump yang cenderung kepada *selective isolationism* (Wardhana & Dugis, 2019). Tema ini penting karena terkait dengan fenomena kebijakan pembatasan imigrasi yang berbasis strategi *selective isolationism* dari suatu negara besar yang dikenal sebagai pengusung utama demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri suatu negara yang kontradiktif dengan citranya ini menjadi menarik untuk dikaji.

Kerangka Konseptual:

Kebijakan Luar Negeri: Isolasionisme Amerika Serikat

Dalam menganalisis alasan dan tindakan Trump membatasi kaum imigran ke AS pada masa kepemimpinannya, digunakan konsep kebijakan luar negeri. Sebagai negara, AS memiliki kepentingan nasional yang harus dipenuhi sehingga memerlukan rancangan kebijakan yang tepat dan komprehensif, termasuk kebijakan luar negeri AS. Dalam hal ini, kebijakan adalah suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dalam mencapai tujuan kepentingan nasional. Lebih lanjut, pemerintah suatu negara membuat kebijakan luar negeri dengan merancang strategi atau rencana dalam menghadapi kelompok politik internasional atau negara yang lainnya (Plano & Olton, 1999: 5)

Selain itu, Heywood menyebutkan bahwa konsep merancang kebijakan luar negeri ada yang dinamakan sebagai *rational actors model* (Heywood, 2011). Terdapat tiga indikator penghampiran yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, mengidentifikasi masalah-masalah mendasar suatu kegiatan yang dilakukan aktor negara dalam rangka mencari, menelaah, maupun meneliti suatu persoalan yang dimulai secara mendasar hingga nantinya yang akan ditetapkan sebagai sebuah permasalahan yang ada di dalam negaranya yang didukung oleh berbagai fakta dan bukti yang ada. Sehingga aktor tersebut kemudian akan dapat menentukan langkah selanjutnya untuk diambil setelah proses identifikasi tersebut selesai. Seperti halnya yang dilakukan oleh presiden Donald Trump ketika melihat tingkat pengangguran di AS bertambah karena kedatangan para kaum imigran yang datang ke AS. Selain itu sistem keimigrasian yang dinilai longgar memudahkan para kaum imigran untuk dapat datang ke AS.

Kedua, menetapkan tujuan atau sasaran dengan objektif berdasarkan saran dari berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan atau otoritas. Setelah aktor berhasil

mengidentifikasi berbagai persoalan yang mendasar, selanjutnya aktor akan menentukan tujuan maupun sasaran secara objektif atas tindakan yang akan dilakukannya. Biasanya tujuan ataupun sasaran tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk maupun perangkat seperti kebijakan luar negeri yang akan menjadi ciri atau gambaran dari negara tersebut, yang mana dalam menentukan sasaran tersebut kebijakan tidak dipengaruhi oleh pendapat maupun pandangan pribadi melainkan tertumpu pada pihak yang juga memiliki kekuasaan di negara tersebut. Dalam konteks ini, tujuan dari kebijakan luar negeri AS adalah menyelenggarakan *national interest* demi melindungi wilayah negara, pendapatan dan sekutu. Bahkan, kebijakan tersebut selalu dinamis tergantung pada situasi dan kondisi, termasuk tergantung pada aktor dalam membuat kebijakan.

Ketiga, menelaraskan segala langkah atau upaya untuk meraih tujuan serta merencanakan evaluasi untuk mencapai efektivitas dari kebijakan dan keyakinan dari masyarakat/publik sampai kepada penyesuaian ke anggaran dan lainnya. Dengan hal ini, dapat dituangkan ke dalam bentuk strategi maupun kebijakan luar negeri dari negara tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dari negaranya atas isu yang menjadi permasalahan di negaranya. Selain itu, dapat juga melihat kepada sejarah dari negara tersebut sebagai gambaran untuk kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan yang mana secara berkala melakukan evaluasi atau kemungkinan perbaikan akan perkembangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau dikehendakinya..

Isolasionisme ialah suatu bentuk dari kebijakan luar negeri AS yang merupakan sebuah prinsip atau praktik politik dengan menunjukkan minat hanya pada negaranya sendiri dan tidak terlibat dalam kegiatan internasional. Secara historis isolasionisme mulanya diterapkan ketika AS memutuskan untuk tidak terlibat dalam konflik Eropa dan Asia dan tidak menginginkan terjerat dalam politik internasional. Pola isolasionis ini berlaku sejak awal masa penerapan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh para pembuat keputusan luar negeri AS, lalu menjadi suatu kebijaksanaan. Lebih lanjut, politik isolasionisme berlaku karena adanya politik imperialisme yang besar kepada negara-negara lemah di luar Eropa. Pada tahun 1823 sifat isolasionisme dikembangkan oleh James Monroe karena ingin mengusir perserikatan besar di AS, hingga akhirnya Amerika tampil dalam bentuk intervensi pada wilayahnya sendiri. Akan tetapi, karena AS waktu itu sebagai pembela Amerika, maka kebijakan ini juga untuk membantu Amerika dari ancaman. Sehingga muncul doktrin

Monroe yang kemudian dikenal dengan semboyan “*American for the American*” (Soebantardjo, 1961: 139).

Secara filosofis pandangan isolasionisme bermakna, yakni: Pertama, AS terpisah secara geografis Eropa (arena utama saat abad ke-18 dan ke-19 dari politik internasional) dan dari belahan dunia lainnya. Sehingga bagi AS, tidak ikut campur urusan negara lain tampaknya sebuah hal yang praktis; Kedua, AS merupakan wilayah yang relatif besar dan pasukan yang cukup minim. Sehingga, pandangan untuk mencari musuh dengan potensi konflik di luar negara hampir tidak akan menjadi bijaksana; Ketiga, kesatuan dalam negeri – sebuah rasa dari nasionalisme – masih terbatas dan pantas mendapat perhatian lebih daripada kebijakan luar negeri; dan keempat, tugas utama untuk menyelesaikan dan memodernisasi benua Amerika memberikan alasan yang cukup untuk mengadopsi sebuah sikap isolasionisme (McCormick, 2010: 12). Dalam konteks ini, pilihan AS untuk memprioritaskan urusan dalam negeri menjadi hal yang sangat rasional, mengingat AS juga saat itu masih relatif baru dan perlu untuk perencanaan konstruksi dan pembangunan yang komprehensif.

Selain itu, dua pernyataan di awal sejarah dari pidato Washington’s Farewell dan Doktrin Monroe secara efektif menggambarkan kebijakan Amerika tentang isolasionisme dan menetapkan batasan pada penerapannya. Pada September 1796 Washington’s Farewell yang pada awalnya pidato tersebut dimaksudkan untuk berterimakasih kepada masyarakat Amerika atas kepercayaan mereka pada kepemimpinannya, dan juga untuk memperingatkan ancaman terhadap kelangsungan Republik. Washington memperingatkan masyarakatnya untuk tidak terlibat dalam kelompok faksi, divisi sektional, ataupun keterlibatan internasional. Sedangkan, Doktrin Monroe menetapkan pedoman khusus untuk keterlibatan AS dalam urusan internasional. Doktrin ini sebagian diumumkan sebagai sebuah tanggapan untuk kemungkinan campur tangan oleh kekuatan negara-negara Eropa ke dalam urusan dari benua Amerika (McCormick, 2010: 13–14).

Selain itu, Doktrin Monroe memunculkan konsep “dua bidang” dalam kebijakan luar negeri AS dengan menekankan perbedaan antara belahan barat dan timur, yaitu: dunia baru versus dunia lama. Monroe berbicara menentang keterlibatan politik dalam urusan Eropa, tetapi dia melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa kebijakan politik AS *non-involvement* tidak berlaku untuk Amerika Latin. Bahkan doktrinnya membuat jelas bahwa AS memang memiliki kepentingan politik di luar perbatasannya (McCormick, 2010: 13–14).

Dalam konteks ini, salah satu alasan mengapa AS menerapkan isolasionis ialah karena nilai-nilai demokrasi yang ada dan berlaku di negara tersebut cenderung berbeda dengan negara lain, termasuk Eropa. Sehingga, ketika banyak pendatang dari Eropa masuk ke Amerika, menjadikan masyarakat AS menaruh rasa curiga. Hal ini, dikarenakan masyarakat Amerika takut jika nantinya nilai-nilai demokrasi yang ada justru dikompromikan (McCormick, 2010: 12). Oleh karena itu, kecenderungan Trump untuk melakukan isolasionisme di slogan yang mirip pada era Monroe, yakni: *American First* menjadi sebuah bentuk ekspresi untuk mengutamakan kepentingan nasional ketimbang keterlibatannya dalam politik internasional.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai pendekatan fenomenologis atau naturalis. Pendekatan ini juga merupakan sebuah strategi penelitian yang mengutamakan penggunaan kata-kata ketimbang angka-angka (kuantifikasi), baik dalam pengumpulan data maupun analisis data. Selain itu, juga menekankan pada pola induktif atau pola hubungan antara teori dan penelitian. Sehingga, penelitian kualitatif dinggap sebagai suatu proses penyelidikan yang dapat memahami makna dan mengeksplor permasalahan-permasalahan sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2014: 1–2). Dalam konteks ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini melihat fenomena tentang pembatasan kaum imigran oleh Presiden Donald Trump melalui kebijakan *American First*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menelusuri berbagai sumber-sumber baik artikel ilmiah, buku, sumber-sumber dari internet, seperti media daring, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selain itu, artikel ini akan membahas alasan Trump dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya kaum imigran ke AS. Dengan konsep kebijakan luar negeri dan imigran sebagai alat dalam menganalisis, data-data yang didapatkan diolah, dianalisis agar dapat menghasilkan sebuah interpretasi kualitatif.

Hasil dan Diskusi

Isolasionisme Era Donald Trump

Isolasionisme merupakan pandangan yang diteliti secara mendalam dan menarik tentang bagaimana dorongan untuk menjauhkan dunia dari sebagian besar yang telah menentukan AS dan kebijakan luar negerinya sejak negara itu didirikan. Selain itu, isolasionisme merupakan studi yang diteliti dengan hati-hati dan disajikan dengan jelas tentang kebijakan

luar negeri AS yang menunjukkan kekuatan skeptimisme Amerika yang bertahan lama tentang komitmen internasional yang terbuka dengan argumen kebijakannya dalam tinjauan yang cermat terhadap sejarah Amerika (Kupchan, 2020). Dalam hal ini, isolasionisme AS dapat dicirikan dari dua sikap, yakni: proteksionisme, dan non-intervensi. Proteksionisme merupakan sikap yang menunjukkan bahwa AS di bawah kepemimpinan Donald Trump tidak menganut pasar bebas atau tidak membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Trump juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi Amerika dari serangan produk-produk yang datangnya dari luar Amerika. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika harus kembali ke produk-produk buatan dalam negerinya (Bouët & Laborde, 2017). Sedangkan non-intervensi merupakan seorang pemimpin di suatu negara dalam sebuah kebijakan luar negeri harus menghindari hubungan dengan negara lain, tapi juga tetap harus mempertahankan relasi serta tidak terlibat perang. Non-intervensi semacam ini lebih cenderung kepada mempertahankan diri dan memilih untuk tidak terlibat atau tidak ikut campur dalam urusan dalam negara lain, pun sebaliknya negara lain pun tidak boleh terlibat dalam urusan negara tersebut tanpa seizin dari pemimpin negara itu sendiri (Hodges, 1915).

Pada masa kepemimpinan Donald Trump isolasionisme merupakan penggabungan prinsip neo-isolasionisme dan *selective engagement*. Neo-isolasionisme merupakan sebuah konsep tentang memfokuskan pada urusan domestik saja, dan menarik diri dari keterlibatan pada tingkat internasional (Posen & Ross, 1997). Dalam hal ini, AS menganggap bahwa internasionalisme merupakan suatu kebijakan yang tidak penting bahkan bersifat kontra produktif. Dalam konteks ini, ada tiga asumsi utama dari neo-isolasionisme, yakni: pertama, bahwa secara fisik, AS aman dari berbagai macam serangan eksternal; Kedua, komitmen ekonomi AS di luar negeri sangat mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan dari kekuatan militer; dan ketiga, komitmen militer di era damai merupakan hal yang berimplikasi negatif dan justru membahayakan keamanan AS. Berdasarkan asumsi tersebut, maka neo-isolasionisme dianggap tepat bagi ekonomi AS dan internasionalisme justru hanya akan mengarah kepada beban ekonomi ataupun militer yang harus diemban oleh AS. (Wardhana & Dugis, 2019). Sedangkan *selective engagement* yaitu strategi ketika AS hanya terlibat dengan negara-negara yang dianggap penting saja yang memainkan peran esensial dalam pola hubungan internasional (Posen & Ross, 1997). Dalam konteks ini, ada tiga kebijakan yang menyusun *selective engagement*, yakni: Pertama, adanya kapabilitas militer yang

memadai untuk memastikan keterlibatan AS dilakukan pada tempat dan wilayah yang secara strategis mendukung keberlangsungan kepentingan nasionalnya; Kedua, adanya kebijakan politik yang mendukung implementasi strategi, yaitu: kebijakan politik yang mengakomodasi kepentingan AS dengan aktor-aktor penting yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya; dan ketiga, adanya dukungan domestik yang besar untuk menjalankan kebijakan-kebijakan strategis yang ditandai dengan legitimasi dan dorongan kepada pemerintah untuk menjustifikasi aksinya (Wardhana & Dugis, 2019)

Jadi, *selective isolationism* merupakan penggabungan dari prinsip neo-isolasionis dan *selective engagement* yang berarti bahwa AS mengurangi keterlibatannya pada tingkat internasional yang bukan hanya fokus untuk domestik tetapi juga pada wilayah yang secara strategis dapat mendukung tercapainya kepentingan nasional AS. Dalam konteks ini, dapat dilihat dari dua tahap, yakni: tahap reorientasi kebijakan luar negeri, dan pengurangan komitmen internasional (Wardhana & Dugis, 2019). Dalam hal ini, secara tegas bahwa Trump mengutamakan masyarakatnya ketimbang berbaik diri pada tataran Internasional, dan konsep ini tertuang pada slogan *America First*.

Selain itu, kebijakan isolasionisme yang diterapkan Trump juga mencakup nasionalisme sering dihubungkan dengan xenophobia, yaitu; ketakutan atau anti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan asing, termasuk para kaum imigran yang datang ke AS. Xenophobia ini berkembang pesat dan berimplikasi kepada tindakan-tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam maupun pendatang dan perbedaan agama. Selain itu, xenophobia sendiri merupakan sebuah sikap, curiga, perilaku yang menyingkirkan, mengecualikan serta menjelek-jelekan orang lain yang menurut pendapatnya bahwa mereka adalah orang asing (ILO serta IOM, 2001). Xenophobia sering dihubungkan dengan kepercayaan pada tatanan dunia hierarkis, yang mana seseorang melihat miliknya (negara-bangsa) sendiri lebih unggul dari yang lain. Bahkan xenophobia menjadi sebuah fenomena multidimensi dan multikausal yang terkait erat dengan gagasan nasionalisme dan etnosentrisme. Juga sering dikaitkan dengan masa ketidakstabilan ekonomi dan politik (Yakushko, 2009: 44).

Secara empiris, kedatangan kaum imigran ke AS menimbulkan xenophobia bagi warga maupun pejabat yang berhaluan konservatif. Kaum imigran yang datang dari berbagai belahan dunia dianggap dapat membawa ancaman nasionalisme. Dalam hal ini, pengelompokan imigran dibagi menjadi dua yaitu imigran resmi (legal) dan imigran tidak

resmi (ilegal). Imigran legal adalah orang yang memiliki izin atau dokumen resmi sedangkan imigran ilegal adalah orang yang tidak memiliki izin atau dokumen resmi ketika masuk atau tinggal di suatu negara (Hanson, 2007). Para imigran yang datang dari latar belakang budaya maupun situasi dan kondisi negaranya tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat asli akan keberadaannya. Permasalahan imigran yang disoroti oleh Trump baik dalam kampanye maupun dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan imigran dari negara-negara Islam ialah kelompok imigran yang masuk bekerja secara ilegal dan kelompok imigran yang mencari suaka serta mengungsi di AS. Sedangkan, pencari suaka sendiri adalah orang yang mencari atau memohon perlindungan kepada suatu negara tertentu dengan pertimbangan dari negara yang memberikannya, seperti; alasan identitas keagamaan, alasan kemanusiaan, alasan politik, alasan diskriminasi ras, dan sebagainya (Hamid, 2002: 35). Pengungsi adalah orang yang melintas batas internasional untuk melarikan diri dari konflik dan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka merupakan sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dengan alasan keselamatan dan biasanya tidak memiliki dokumen resmi atau dokumen perjalanan.

AS merupakan salah satu negara besar dengan penduduk multietnis, dari ras Kaukasia atau disebut kelompok kulit putih dan ras Negroid yaitu kelompok kulit hitam serta dari Asia. Diawali dari migrasi penduduk Indian yang berasal dari Asia menuju ke Amerika pada 15.000 tahun yang lalu dan diikuti migrasi oleh bangsa Eropa dimulai dari tahun 1.600. Dalam konteks ini kelompok kulit putih dianggap sebuah ras yang hebat dan kelompok kulit hitam dianggap sebuah ras yang paling rendah. Judy Rich dari *Institute of Labour Economics* melakukan survei literatur terhadap diskriminasi yang terjadi di AS, dan menghasilkan beberapa simpulan, yakni: a) apabila ingin mendapatkan pekerjaan, maka ras kulit hitam perlu mendaftar hingga 15 (lima belas) kali, ketimbang kelompok kulit putih rata-rata hanya sebanyak 10 (sepuluh) kali; b) kelompok ras kulit putih harus mengenakan pakaian yang sesuai dan harus membayar dengan harga yang lebih tinggi bila masuk di bar; c) dari segi upah, kulit hitam mendapatkan upah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kulit putih. Sehingga, tidak mengherankan apabila tingkat pengangguran kulit hitam lebih tinggi, serta meningkatnya fenomena rasisme dan supermasi ras setelah Trump terpilih menjadi Presiden tahun 2016 (Rich, 2014).

Pandangan Trump terhadap warga muslim AS juga dinilai sentimen seperti tidak bersahabat, apalagi AS mempunyai sejarah panjang akan peristiwa 9/11 yang dianggap

sebagai serangan terorisme terhadap negara AS. Selain itu mengingat akan rawannya perang dan konflik di kawasan Timur Tengah. Tentunya hal tersebut selain menimbulkan banyak korban juga para pengungsi dan para pencari suaka yang tetap berusaha untuk dapat menyambung kehidupannya sehari-hari. Sehingga, berkembang pula ketakutan terhadap Islam atau Islamphobia yang berujung pada upaya untuk menghindari kegiatan yang bernuanasa islami. Dalam konteks ini, pada budaya politik Amerika telah mengakar Islamophobia sebagai sebuah *culture of fear* atau pandangan ideologi pemerintahan dan pendukungnya untuk menebarkan isu-isu anti-Islam (Fahd, 2017). Keputusan yang Donald Trump buat terhadap negara-negara muslim yang akan melakukan perjalanan ke AS dengan cara membatasi atau pelarangan memasuki wilayah AS semata untuk keamanan nasional AS.

American First dan Kebijakan Keimigrasian Trump

Trump membuat kebijakan-kebijakan imigran dengan melihat persoalan mendasar di masyarakat AS, terutama masalah ekonomi dan pengangguran yang berujung pada peningkatan aksi kriminalitas. Potensi ancaman inilah pada akhirnya Trump mengeluarkan kebijakan yang cenderung ‘kontroversial’, demi tercapainya kebutuhan masyarakat AS (Ali, 2017; Daniealdi, 2016). Dalam kampanye politiknya, Trump mengusung ide “*Make American Great Again*”. Baginya, Pada level dunia AS memerlukan perbaikan sistem dan restorasi kekuatan hegemoni. Dukungan terhadap Trump ini dapat menghipnotis pendukung yang juga memiliki pandangan konservatif dan juga merasa resah dengan keberadaan imigran serta insiden terorisme. Pada akhirnya, Trump merespons dukungan tersebut dengan memberikan janji bahwa imigran yang berasal dari negara-negara Islam akan dibatasi dan dilarang imigran masuk ke AS (Yuliantoro dkk., 2017).

Dalam konteks isolasionisme, Pidato Washington’s Farewall dan Doktrin Monroe adalah panduan berharga untuk memahami isolasionisme AS dalam urusan global. Sedangkan Trump lebih menekankan kepada pengurangan komitmen AS pada tataran internasional dan memilih untuk fokus pada pencapaian kepentingan nasional. Dalam hal ini, Trump memprioritaskan pada 4 (empat) kepentingan nasional, yakni: Pertama, melindungi rakyat, tanah air, dan jalan hidup AS, kedua, mempromosikan dan memperjuangkan masyarakat AS; Ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan; Keempat, meningkatkan pengaruh AS di dunia internasional. (Wardhana & Dugis, 2019: 148–152).

Imigran merupakan seseorang yang melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain dengan maksud tinggal dan menetap pada negara tujuan (Ashari, 2015). Akan tetapi kedatangan kaum imigran tersebut ke negara tertentu tidak selamanya baik, hal itu dibuktikan dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari kedatangan kaum imigran ke negara tersebut. Seperti negara AS yang banyak menjadi tujuan kaum imigran untuk berkunjung. Berdasarkan laporan *U.S Immigration & Naturalization Services (INS)* pada Januari 2003 menyatakan bahwa jumlah imigran ilegal di AS sangat tinggi dan mencapai lebih dari 7 juta penduduk tidak sah. Diantaranya diperkirakan 44,8 juta berasal dari Meksiko yang berarti sekitar 70% dari jumlah total penduduk imigran ilegal yang berada di AS (*Department of Homeland Security*, 2000). Tingginya angka ini, dikarenakan kurangnya peluang kerja di negara asal mereka, dan ini berimplikasi pada tingginya tingkat imigrasi ilegal asal Meksiko ke AS tiap tahun. Bahkan pada tahun 2007 mencapai angka 11,8 juta dan 11,6 juta pada tahun 2008 (Hoefler et al., 2009: 2). Sedangkan pada masa pemerintahan Trump, keberadaan imigran seringkali dianggap sebagai kelompok yang berpotensi mengambil lahan pekerjaan warga asli. Sehingga, tidak heran apabila permasalahan imigran pun semakin tidak bisa dipisahkan lagi dari masalah keamanan, lapangan pekerjaan hingga identitas nasional. Kondisi ini dijadikan pembenaran bagi kaum kulit putih yang kontra terhadap keberadaan imigran. Kondisi semacam ini, lalu menjadi semakin rumit ketika marak jejaring pembuat dokumen ilegal, maraknya peredaran narkoba, aksi terorisme, kriminalitas, hingga pada ancaman kebudayaan (Yuliantoro, 2017).

Donald Trump mengawali karir sebagai pengusaha pengembang *real estate* di Manhattan, AS. Keakrabannya dengan dunia militer yang mempengaruhi sikap dan kepribadiannya, yakni tegas, tangguh dan disiplin. Kesuksesan Trump sebagai pengusaha juga diikuti dengan perjalanan karir politiknya, termasuk sukses menjadi Presiden AS ke-45. Dengan latar belakang pengusaha, kebijakan-kebijakan luar negeri Trump selalu berorientasi pada orientasi keuntungan ekonomi dan tertuang dalam ide "*Make American Great Again*". Slogan tersebut menunjukkan bahwa Trump yakin atas keunggulan dan ekonomi AS akan bangkit, sehingga tidak heran jika kebijakan luar negeri AS era Trump cenderung kepada memproteksi diri.

Trump menerapkan politik isolasionisme yang mana ia lebih memilih fokus dalam mengurus masalah dalam negeri melindungi AS dari ancaman dunia luar. Baginya postur kebijakan luar negeri dengan mengutamakan kepentingan warga negara asli dengan

menjadikan AS menjadi hebat kembali sesuai dengan slogan *Make American Great Again* akan menjadikan dunia internasional kembali disegani. Hal ini dibuktikan oleh Trump dengan keluar dari kesepakatan kerja sama multilateral. Sebagai contoh ialah, keluar dari Dewan HAM PBB tahun 2018 dan dari kerja sama *Trans-Pasific Partnership* beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden. Serta keluar dari kerja sama iklim Paris 2015 pada tahun 2017.

Kebijakan *American First* merupakan kebijakan yang diambil untuk kepentingan nasional negaranya, termasuk fokus dalam isu keamanan nasional dan sistem keimigrasian AS. Dalam konteks ini, Trump membatasi imigran dari negara bermayoritas muslim ke AS dan membangun tembok besar perbatasan diantar Meksiko-AS dalam rangka mengamankan wilayah AS. Adapun kebijakan imigran Trump mengacu pada tiga kebijakan beserta masing-masing indikatornya yaitu: Nasionalisme, Anti-Imigran dan Anti-Muslim.

Kebijakan Nasionalisme

Nasionalisme merupakan paham tentang cinta tanah air dengan mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme juga bagian dari sikap politik masyarakat tentang keselarasan budaya dan wilayah. Dalam hal ini, sebuah komunitas dengan identitas bersama memiliki tujuan dan cita-cita untuk mencapai kepentingan nasional, dan keinginan untuk mempertahankan negaranya baik internal maupun eksternal. Kebijakan *American Frist: Make American Great Again* merupakan kebijakan nasionalisme yang sangat isolasionis. Kebijakan ini juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman nasional baik dari dalam maupun dari luar. Untuk menjunjung semangat nasionalisme, Trump berusaha memberikan solusi dengan memastikan bahwa orang-orang atau kelompok yang tidak sepemahaman dengan ide dan cita-citanya akan mendapatkan pencegahan ketika hendak masuk ke wilayah AS. Dalam konteks ini, kebijakan nasionalisme Trump terdiri dari dua, yaitu; kebijakan imigrasi pemerintahan Trump dan *white supremacy*. Kebijakan keimigrasian adalah salah satu janji kampanye Trump semasa kampanye pemilu 2016, Janji ini didasari karena angka kriminalitas yang tinggi dilakukan oleh kaum imigran, terutama imigran ilegal. Trump membuat pernyataan membenaran bahwa angka kriminilitas yang tinggi selama ini seperti pembunuhan, pencurian dan kriminalitas lainnya dilakukan oleh imigran yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menjadikan AS terpuruk baik dari segi ekonomi maupun keamanan (Fadil, 2020)

Di satu sisi, salah satu tujuan imigrasi bangsa Eropa sejak abad ke-16 adalah AS, dan

sejak pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20 jumlah imigran semakin meningkat dari 20 juta orang mencapai sampai 100 lebih dari juta jiwa (Altabaa & Hamawiya, 2019). Khusus imigran muslim yang masuk ke AS dan berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan beberapa dari Cina, Afrika, Iran, Bosnia dan Somalia dan berlanjut hingga tahun 1924 saat AS membatasi imigrasi orang-orang non Eropa. Gelombang pertama berlangsung sekitar 1875, yang mana para imigran muslim tersebut pada umumnya imigran yang tidak pandai dan tidak memiliki keterampilan. Lalu Gelombang kedua sekitar tahun 1920-an, AS hanya membolehkan keturunan Negro atau Kaukasia. Gelombang ketiga dimulai tahun 1965 yang menghapuskan kuota berdasarkan negara asal dan membatasi jumlah imigran per tahun dan gelombang imigrasi muslim keempat, mereka pada umumnya sangat terdidik (Ariefyanto, 2012). Menurut Trump, secara ekonomi kesempatan kerja di AS telah diserobot oleh kaum imigran, dan warga negara AS pun telah menjadi target aksi terorisme (Pujayanti, 2017). Meskipun sebenarnya, kebijakan ini telah menimbulkan reaksi besar dari dunia internasional, hal ini disebabkan bahwa Trump telah membuat diksi bahwa yang melakukan aksi kejahatan, termasuk terorisme ialah kaum imigran dari berbagai negara Timur Tengah (Ariefyanto, 2012).

Sedangkan *white supremacy* atau supermasi kulit putih merupakan pandangan ras kulit putih lebih kuat dan lebih unggul daripada ras lainnya. Rasisme anti hitam dan anti semitisme juga dikaitkan dengan konsepsi *white supremacy*. Bahkan konsep supremasi putih juga digunakan sebagai justifikasi bahwa ras kulit putih bukan hanya kuat, tetapi juga harus berkuasa dan boleh membinasakan kelompok-kelompok yang bukan kulit putih. Pandangan seperti ini mengakibatkan kaum kulit hitam dianggap budak atau kelas bawah di Amerika (O'Callaghan, 2004). Selain itu, secara tidak langsung Trump menarik perhatian dari kelompok supremasi kulit putih dengan selalu menekankan atau menggunakan diksi *patriotism*, *heritage*, dan *security* untuk kembali mendorong munculnya supremasi kulit putih (Sanchez, 2018).

Bangkitnya supremasi kulit putih di AS juga didukung oleh retorika presiden Trump dengan diksi “mengembalikan kejayaan AS”. Bahkan propaganda di AS juga terjadi pada sosial media dan generasi baru *white supremacy* kembali mencuat (Kertopati, 2017). Sehingga kampanye negatif *white supremacy* terus berkembang, dan tidak heran jika warga negara AS – yang mendukung supermasi kulit putih – menganggap bahwa kedatangan kaum imigran sebagai “*white oppression*” atau penindasan terhadap kaum kulit putih. Atas dasar

tersebut, kaum kulit putih memiliki keberanian untuk muncul di tempat umum yang menyatakan dukungannya kepada Trump (Amelia, 2009).

Kebijakan Anti-Imigran

Selain kebijakan nasionalisme yang dengan membatasi kaum imigran dan dukungan pandangan supermasi kulit putih, Trump juga menerapkan kebijakan anti-imigran. Banyaknya imigran ilegal khususnya dari Meksiko ke AS menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi dan keamanan. Dalam hal ini imigran ilegal terbanyak di AS berasal dari Meksiko sebanyak 60% dan sebanyak 20% berasal dari negara-negara di Amerika Latin lainnya. Bahkan lebih dari 1 juta imigran ilegal berasal dari Asia (Jhonson & Laura, 2011).

Masyarakat asli AS harus bersaing dengan kaum imigran ilegal untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, imigran yang sudah lama tinggal di AS akan mendapatkan fasilitas yang baik oleh pemerintah baik dari segi pendidikan ataupun kesehatan. Wilayah antara AS dan Meksiko hanya dibatasi oleh kawat berduri yang tingginya 3-5 dan hanya sebagian kecil wilayah perbatasan yang dijaga ketat oleh tentara AS. Dari segi keamanan imigran ilegal dapat melintas batas tanpa penjagaan yang ketat dan melakukan pelanggaran hukum di AS. Oleh karena itu, Trump khawatir akan bertambahnya kedatangan kaum imigran dapat memberikan dampak buruk bagi negara dan masyarakat, dan besarnya angka kriminalitas, seperti perdagangan narkoba (Ballal dkk., 2011; Fitriani, 2014). Bahkan imigran ilegal yang bekerja di AS mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal (Fitriani, 2014).

Berdasarkan pertimbangan keamanan darurat Trump, akhirnya AS memperketat keamanan di wilayah AS-Meksiko untuk menghalangi masuknya kaum imigran ilegal dengan melakukan *border security and immigration enforcement improvements* dan pembangunan tembok perbatasan pada 25 Januari 2017 (Ramadhani, 2019). Bahkan Trump mengajukan RUU anggaran pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko (CNN Indonesia, 2019). Bahkan pada era Trump, AS enggan memberikan status kepada orang-orang yang datang dari negara Amerika Latin yang tidak memiliki dokumen resmi dan bekerja sebagai buruh kasar (BBC Indonesia, 2019).

Kebijakan Anti Muslim

AS mempunyai budaya, nilai, dan agama yang berbeda menjadikan muslim di AS sebagai kelompok minoritas. Meskipun demikian kebudayaan imigran muslim mengalami

pertumbuhan yang signifikan di AS (Alikhani & Gharedaghi, 2017) dan bahkan banyak masyarakat barat tertarik untuk memperdalam Islam. Situasi ini menjadi kekhawatiran bagi kaum konservatif terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan AS (Mohamed, 2016).

Setelah tragedi 9 September 2001, Pemerintah George W. Bush menjadikan negara-negara muslim sebagai kambing hitam. Saat itu, Osama bin Laden dituduh sebagai dalang dalam penabrakan dua gedung ikonik yaitu WTC dan Pentagon. Tuduhan tersebut menjadikan citra Islam di AS dan dunia internasional menjadi buruk. Citra muslim dan negara-negara muslim sebagai teroris merupakan stereotip yang tidak berdasar, bahkan Griffin meragukan bahwa muslim sebagai dalang dari aksi tersebut. Ia menyebutkan bahwa peristiwa 9/11 sebagai *The New Pearl Harbor* (Griffin, 2004). Dalam konteks ini, masyarakat AS terbelah menjadi dua, yakni: kelompok konservatif yang menganggap bahwa Islam menjadi akar masalah dalam berbagai aksi terorisme selama ini di AS, dan kelompok progresif yang menganggap bahwa muslim sebagai kelompok yang dikorbankan, hal ini dibuktikan dengan bertumbuhnya masyarakat muslim AS (Alikhani & Gharedaghi, 2017).

Kelompok konservatif memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan Trump, termasuk dalam memperketat pengawasan bagi kaum imigran khususnya muslim untuk datang ke AS. Trump mengeluarkan kebijakan perintah eksekutif yang kontroversial dengan mengesahkan perintah eksekutif dengan tujuan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into The United States dan Travel Ban*, yakni: 1) berlakunya aturan pelarangan imigran muslim masuk ke Amerika Serikat setelah enam hari menjabat sebagai Presiden; 2) pelarangan penerbitan visa bagi warga negara mayoritas muslim seperti Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman dan Suriah yang mana masing-masing selama 90 hari dan 120 hari. Bagi Trump ketujuh negara tersebut diidentifikasi memiliki organisasi teroris atau tempat para teroris untuk berlindung (Goodman, 2017); dan 3) Pelarangan penerimaan pengungsi untuk beberapa bulan, kecuali bagi imigran yang melarikan diri dari persekusi agama minoritas. Kebijakan yang dikenal sebagai *travel ban* ini merupakan bentuk resistensi Trump terhadap aksi terorisme dan gelombang pengungsi dan pencari suaka ke AS (Thontowi, 2017). Adapun fokus kerja dari *travel ban* ialah dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara dengan meningkatkan protokol dan prosedur informasi, manajemen identitas, manajemen resiko tentang permasalahan teroris dan keselamatan publik (Rachman, 2018).

Kebijakan tersebut mendapatkan protes keras dari kelompok muslim dengan berdemonstrasi dengan membawa poster “Tidak Ada Manusia yang Ilegal” dan “Setiap

Muslim Yang Saya Tahu Adalah Warga Amerika Yang Lebih Baik Dibanding Donald Trump”. Dalam hal ini, kebijakan anti-muslim justru mempertegas bahwa Trump mendukung Islamphobia di AS dan dapat berdampak pada rasa saling curiga antara warga AS sendiri. Termasuk, tidak mencerminkan prinsip AS yang liberal dan demokratis (Zulian, 2019). Kebijakan anti-muslim Trump menunjukkan bahwa Trump tidak ramah (*unfriendly*) terhadap masyarakat muslim AS. Bahkan kebijakan anti-muslim ini justru yang menunjukkan ada diskriminasi agama di AS selama masa kepemimpinan Trump. Selain itu, Trump juga menganggap bahwa kulit putih lebih baik dibanding dengan kaum minoritas, adanya perbedaan perlakuan yang Trump tujukan membuat kekhawatiran dan ketakutan bagi kaum minoritas akan adanya perlakuan tindak kejahatan maupun kekerasan yang bisa saja terjadi.

Untuk mendukung kebijakan kontroversial, Trump juga mengeluarkan kebijakan *Zero Tolerance* untuk menghalangi imigran gelap. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah federal dibolehkan untuk menuntut pidana bagi setiap orang dewasa yang melawati lintas batas secara ilegal. Bahkan pemerintah AS mengajukan tuntutan kepada semua imigran yang ketahuan tidak memiliki dokumen atau izin resmi (Mazrieva, 2018). Tentunya berbagai kebijakan yang Trump lakukan untuk kaum imigran tidak lepas dari respons masyarakat AS sendiri. Masyarakat pro akan kebijakan Trump merasa diuntungkan karena Trump dianggap mampu mengatur dan mengolah perekonomian dan dapat menyelamatkan AS dari kebangkrutan. Selain itu, Trump juga dianggap mampu menjaga keamanan AS dari serangan teroris “Islam Radikal”. Sedangkan masyarakat kontra menilai bahwa kebijakan Trump dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip kebebasan di AS. Beberapa kebijakan Trump dinilai diskriminatif dan tidak toleran terhadap kaum imigran di AS. Banyak dari mereka yang melakukan aksi-aksi demonstran di wilayah AS dalam memperjuangkan keadilan

Simpulan

Kebijakan *American First* dengan mengadopsi *selective isolationism* merupakan langkah *Grand Strategy* AS di bawah pemerintahan Donald Trump demi mengatasi permasalahan di masyarakat. Hal ini dilakukan karena permasalahan ekonomi, sosial bahkan imigrasi diartikan sempit oleh Trump dengan dalih keamanan nasional. Tafsiran sempit ini mendorong Trump untuk membuat kebijakan ketelibatan pada tataran internasional dan memilih untuk fokus serta berorientasi pada urusan domestik. AS benar-benar memilih kerja sama internasional hanya dalam konteks mendukung keterlibatan Amerika kepentingan masyarakat AS, dan

terkesan mengabaikan kerja sama dan perjanjian internasional yang dianggap merugikan AS.

Strategi *selective isolationism* ini juga berimplikasi pada pembatasan kaum imigran untuk masuk ke Amerika Serikat. Trump menggunakan doktrin baru gaya lama dengan membangun narasi *American First* yang tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern AS yang demokratis. Doktrin *American First* pada akhirnya menjadi sebuah kontranarasi dengan keberadaan kaum imigran yang telah banyak membangun perekonomian AS. Di samping itu, keberadaan *white supremacy* juga merupakan narasi yang dibangun era kolonial yang justru mempertajam jurang pemisah antara kulit putih dan kulit hitam di AS. Sehingga, menjadi sangat wajar apabila Doktrin *American First* ini tidak populer pada sebagian masyarakat AS dan dunia internasional. Ketidakpopuleran doktrin ini, sebenarnya telah terlihat sejak pelantikannya menjadi Presiden pada 20 Januari 2017 yang tidak seramai pelantikan para pendahulunya dan terus berlanjut hingga pada percobaan pemakzulan sebanyak dua kali oleh senat. Dengan demikian, *selective isolationism* juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi global karena terjadi pembatasan kerja sama yang dianggap justru akan mengarah kepada kerugian ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ali, I. S. (2017). *Amerika: Bangsa Imigran*. Republika.co.id. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/03/09/omj8az396-amerika-bangsa-imigran>
- Alikhani, A. A., & Gharedaghi, A. A. (2017). Muslims in America: Identity Dilemma and the Islamic Fundamentals of Coexistence. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 5(2), 13–27. <https://doi.org/10.15640/jisc.v5n2a2>
- Altabaa, H., & Hamawiya, A. (2019). Kreativitas Kaum Imigran dalam Konteks Historis. *Society*, 7(2), 64–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v7i2.85>
- Amelia, D. (2009). *Retorika Rasisme di Era Trump: Bagaimana Pengaruhnya terhadap Perilaku Masyarakat Amerika?* Kompasiana.
- Ariefyanto, M. I. (2012). *Melongok Kaum Imigran di AS*. Republika.co.id. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/03/28/m1liek-melongok-kaum-imigran-di-as>
- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Nusa Cendekia.
- Ballal, A., Baskozos, A., Chesnokova, D., Gan, P. Y., Corral, L. G., Marra, S., & Tahiyat, I. (2011). *The Drug Cartel Cluster in Mexico*.
- BBC Indonesia. (2019). *AS tidak akan berikan status penduduk tetap kepada imigran penerima program bantuan*. BBC Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49315306>
- Bouët, A., & Laborde, D. (2017). *US Trade Wars with Emerging Countries in the 21st*

- Century: Make America and Its Partners Lose Again* (No. 01669; IFPRI Discussion Paper). Diakses dari https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/koenig-pamina/article_us_tradewars_bouet_laborde_2017.pdf
- CNN Indonesia. (2019). *Trump Ancam Tutup Perbatasan dengan Meksiko Pekan Depan*. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190330155224-134-382004/trump-ancam-tutup-perbatasan-dengan-meksiko-pekan-depan>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publication, Inc.
- Daniealdi, W. T. (2016). *Trump dan Konservatisme*. Republika.co.id. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/obhd0620/trump-dan-konservatisme>
- Department of Homeland Security. (2000). *Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990 to 2000*. https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/III_Report_1211.pdf
- Fadil, I. (2020). Analisis Karakteristik Personal Donald Trump Dalam Kebijakan Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States. *Journal of International Relations*, 6(2), 257–266. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/27207/23817>
- Fahd, C. (2017). *Terror, Muslims, and a culture of fear: challenging the media messages*. The Conversation. Diakses dari <https://theconversation.com/terror-muslims-and-a-culture-of-fear-challenging-the-media-messages-77170>
- Fitriani, H. (2014). *Kebijakan AS Dalam Menangani Imigran Ilegal Meksiko dan Dampaknya Terhadap Hubungan Bilateral AS-Meksiko Periode 2009-2012*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39293>
- Goodman, J. (2017). *Mengapa Trump larang warga tujuh negara masuk ke AS?* BBC Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>
- Griffin, D. R. (2004). *The New Pearl Harbor: Disturbing Question about the Bush Administration and 9/11*. Olive Branch Press.
- Hamid, S. (2002). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanson, G. H. (2007). *The Economic Logic of Illegal Migration*. Diakses dari <https://www.cfr.org/report/economic-logic-illegal-immigration>
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Hodges, H. G. (1915). *The Doctrine of Intervention*. The Banner Press.
- Hofer, M., Rytina, N., & Baker, B. C. (2009). *Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2008*. Diakses dari <https://data.amerigeoss.org/es/dataset/estimates-of-the-unauthorized-immigrant-population-residing-in-the-united-states-january-2-2cd7>
- ILO, & IOM. (2001). *International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia*. Diakses dari https://publications.iom.int/system/files/pdf/international_migration_racism.pdf
- Jhonson, H. H., & Laura. (2011). *Illegal Immigration*. Public Policy Institute of California. https://www.ppic.org/content/pubs/atissue/AI_711HJAI.pdf

- Kertopati, L. (2017). *Donald Trump dan Bangkitnya Supremasi Kulit Putih di AS*. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170815143251-134-234889/donald-trump-dan-bangkitnya-supremasi-kulit-putih-di-as>
- Kupchan, C. A. (2020). *Isolationism: A History of America's Efforts to Shield Itself From the World*. Oxford University Press.
- Mazrieva, E. (2018). *Ribuan Warga AS Protes Kebijakan Imigrasi "Zero Tolerance."* VoA. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-as-protes-kebijakan-imigrasi-zero-tolerance-/4461979.html>
- Mccormick, J. M. (2010). *American Foreign Policy and Process* (Fifth Edit). Cengage Learning.
- Minardi, A., Taufik, & Ridha, N. (2019). Impact of Trump Tariffs Policies on the Export of Indonesian Steel to the United States. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(7), 1–16. https://www.ijicc.net/images/vol10iss7/10709_Minardi_2019_E_R.pdf
- Mohamed, B. (2016). *A new estimate of the U.S. Muslim population*. Pew Research Center. Diakses dari <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/>
- O'Callaghan, B. (2004). *An Illustrated History of the USA*. Longman.
- Plano, J. C., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Abardin.
- Posen, B. R., & Ross, A. L. (1997). Competing Vision for U.S Grand Strategy. *International Security*, 21(3), 5–53.
- Pujayanti, A. (2017). Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf)
- Rachman, M. A. R. (2018). Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump. *Cosmogocv: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 227–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16811>
- Ramadhani, Y. (2019). *Tembok Batas AS-Meksiko yang Diinginkan Trump Ancam Habitat Hewan*. Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/tembok-batas-as-meksiko-yang-diinginkan-trump-ancam-habitat-hewan-deoa>
- Rich, J. (2014). *What Do Field Experiments of Discrimination in Markets Tell Us?: A Meta Analysis of Studies Conducted since 2000* (No. 8584; Discussion Paper). <https://ftp.iza.org/dp8584.pdf>
- Sanchez, J. C. (2018). Trump, the KKK, and the Versatility of White Supremacy Rhetoric. *Journal of Contemporary Rhetoric*, 8(1/2), 44–56. http://contemporaryrhetoric.com/wp-content/uploads/2018/02/Sanchez8_1_2_4.pdf
- Sanjaya, H. (2017). *Amerika dan Mimpi Trump*. Spring of Life. Diakses dari <https://adoc.pub/spring-of-life-amerika-dan-mimpi-trump-pameran-yves-saint-la.html>
- Soebantardjo. (1961). *Sari Sedjarah Jilid II Eropa- Amerika*. Bopkari.

- Thontowi, J. (2017). Kebijakan Presiden Trump dan Respons Masyarakat Terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di AS. *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 24(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2>
- Voice of America. (2005). *Amerika Masih Negara Imigran*. VoA. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2005-07-26-voa9-85278952/46340.html>
- Wardhana, A., & Dugis, V. M. A. (2019). Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika. *Global Strategis*, 13(2), 152–153.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.141-156>
- Yakushko, O. (2009). Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants. *The Counseling Psychologist*, 37(1), 36–66.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0011000008316034>
- Yuliantoro, N. R., Prabandari, A., & Agussalim, D. (2017). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri AS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 193–209.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2228/2806>
- Zulian, I. (2019). Analisis Pengaruh Islamophobia Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS di Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal Power in International Relations*, 3(2), 140–155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.140-155>